

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terdapatnya banyak pulau menjadikan Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, bahasa daerah, agama dan masih banyak lainnya. Dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, di Indonesia mengakui enam agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, walau demikian kerukunan antar umat beragama sangatlah baik salah satunya di Pulau Bali yang banyak mempunyai tempat ibadah dari semua agama.

Vihara merupakan tempat ibadah umat Buddha. Di Pulau Bali sendiri terdapat 18 Vihara yang tersebar di setiap kabupaten di Bali. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang paling banyak terdapat Vihara yakni delapan, salah satunya adalah Vihara Dharma Rangsi yang terletak di Desa Pemaron. Vihara ini memiliki 24 kepala keluarga yang sebagian besar tinggal di dekat Vihara dan ada beberapa yang berada di luar kota/pulau. Aktivitas yang ada di Vihara seperti Puja Bakti, Sekolah Minggu, Pelayanan Tamu-tamu yang datang, kegiatan oprasional, dan yang akan mulai dikembangkan yaitu pelatihan Sekehe Gong yang mana semua didanai dari sumbangan-sumbangan dari donatur, pihak pemerintah dan iuran yang dibuat/disepakati oleh umat di Vihara.

Peneliti sangat tertarik meneliti terkait iuran yang ada di Vihara Dharma Rangsi karena satu-satunya Vihara di Kabupaten Buleleng yang menerapkan iuran Dana Abadi. Brahma Vihara Arama Banjar, Vihara Samyag Dresti Penglatan, Vihara Samyag Darsana Petandakan, Vihara Giri Manggala Alasangker, Vihara Buddhavamsa Singaraja, Vihara Velluvana Bontihing dan Mahacetiya Buddha Manggala Singaraja tidak menerapkan iuran Dana Abadi melainkan dalam proses kremasi, semua biaya ditanggung oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Selain itu semua Vihara tersebut dalam pendanaan untuk keperluan operasional hanya mengandalkan dana-dana/bantuan dari pihak luar seperti Departemen Agama. Karena hal unik ini peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan iuran yang ada di Vihara Dharma Rangsi. Dalam pengelolaan iuran Dana Abadi tersebut dikelola oleh pengurus Vihara. Setiap bulannya masing-masing kepala keluarga wajib membayar Rp 10.000,-. Dana Abadi ini nantinya akan digunakan untuk keperluan kremasi jika ada dari salah satu keluarga umat yang meninggal dunia. Dana Abadi ini merupakan iuran berupa asuransi yang akan memberikan premi kepada keluarga yang sedang berdukacita.

Dalam Agama Buddha ketika ada keluarga umat yang meninggal, maka wajib diadakan Upacara Avamanggala, memandikan mayat dan kremasi. Dari tahun ke tahun prasarana yang dibutuhkan dalam upacara kremasi semakin mahal. Sehingga untuk mengremasikan mayat diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu Vihara Dharma Rangsi membentuk Dana Abadi sebagai bentuk asuransi yang nantinya akan digunakan sebagai santunan ataupun premi jika ada dari salah satu keluarga umat yang meninggal dunia. Menurut Ketua Vihara Dharma Rangsi, dana abadi ini merupakan kegiatan pengumpulan dana yang nantinya akan

membantu biaya kremasi. Dikatakan membantu biaya karena biaya untuk pembakaran mayat hingga menjadi abu nantinya akan diambil dari iuran dana abadi. Namun, misal terjadi kekurangan biaya (biaya pembakaran mayat hingga menjadi abu lebih besar dari total iuran dana abadi yang terkumpul), maka pihak Vihara siap membayari kekurangan biaya tersebut.

Pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola Dana Abadi ini. Jika pengelolaan keuangan pengurus dapat dilaksanakan dengan baik, itu bertanda pengurus orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan maka masyarakat atau umat akan percaya ketika akan berdana ataupun membayar iuran. Maka dari itu para pengurus dalam mengelola iuran ini harus menerapkan konsep Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, dikatakan Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan transparansi menurut Ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan

informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013). Jadi transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tidak hanya transparansi, akuntabilitas juga sangat penting dilakukan dalam pengelolaan iuran dana abadi. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidak seorang atau pimpinan suatu inti organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabel bahwa iuran yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat.

Menurut Gray et al (2006) dalam Randa (2011) akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi, namun praktiknya di Non Government Organization (NGO) masih sangat lemah dalam (Randa, 2011). Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Sugijanto, et al (1995:6) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi *accountability* tersebut meliputi tiga unsur: (a) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (b) *taking corrective actions where necessary* and (c) *having the internal parties review the information*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: (a) memberikan

informasi tentang keputusan dan tindakan yang diambil selama entitas beroperasi, (b) mengambil tindakan korektif jika perlu dan (c) meminta pihak internal meninjau informasi.

Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas.

Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pengurus Vihara masih belum membuat laporan keuangan secara lengkap, namun pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, tentu saja menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Vihara Dharma Rangsi perlu dipertanyakan. Dengan digunakannya pencatatan yang tergolong sederhana memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan penyelewengan baik sengaja ataupun tidak disengaja dalam pengelolaan iuran ini.

Praktek pengumpulan dana ini tidak ditanggung oleh asuransi-asuransi yang ada. Praktek perasuransi umat, dalam pengelolaan, manajemen dan peraturan masih belum jelas. Atas dasar inilah peneliti mengangkat judul skripsi mengenai **“Analisis Pengelolaan Dana Abadi Sebagai Bentuk Asuransi Di Vihara Dharma Rangsi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Praktek pengumpulan dana abadi di Vihara Dharma Rangsi tidak ditanggung oleh asuransi-asuransi yang ada, hal ini mengakibatkan dalam pengelolaan, manajemen dan peraturan masih belum jelas.
2. Belum adanya laporan keuangan secara lengkap ditambah sistem pencatatan yang sederhana menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Vihara Dharma Rangsi perlu dipertanyakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Hal tersebut dikarenakan topik yang diambil oleh peneliti memiliki cakupan yang sangat luas yang mempunyai keterkaitan dan pengaruh terhadap topik lainnya. Maka peneliti hanya memfokuskan pada analisis pengelolaan dana abadi sebagai bentuk asuransi di Vihara Dharma Rangsi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran premi, proses mengajukan dan merealisasikan klaim premi dana abadi?
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi?
3. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan Vihara Dharma Rangsi dengan PSAK No. 45?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran premi, proses mengajukan dan merealisasikan klaim premi dana abadi.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi.
3. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Vihara Dharma Rangsi dengan PSAK No. 45.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Sedangkan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi Vihara Dharma Rangsi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktik akuntansi pada lembaga Vihara terutama dalam hal manajemen dana abadi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan.

